

Equality Before The Law

Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana

*The Position of Criminal Evidence in The Region of Criminal Procedure Law*

## **Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana**

### ***The Position of Criminal Evidence in The Region of Criminal Procedure Law***

**Shadira Sastra Darmanti**

Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru Riau

Email: [shadirasastra04@gmail.com](mailto:shadirasastra04@gmail.com)

**Dayita nisrina faiha**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang

Email: [dayita.nisrinafaiha03@gmail.com](mailto:dayita.nisrinafaiha03@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedudukan alat bukti petunjuk dalam ranah hukum acara pidana dengan fokus pada perannya dalam menegakkan keadilan. Metode penelitian menggunakan teknik analisis jurnal untuk memahami sudut pandang berbagai penulis dan analisis perundang-undangan untuk mempelajari ketentuan hukum terkait. Hasil penelitian menyoroti peran sentral alat bukti petunjuk dalam mengidentifikasi tindak pidana, mengarahkan penyidikan, dan menguatkan keputusan pengadilan. Sumber-sumber seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa menjadi elemen krusial dalam proses pengadilan, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kredibilitas, keotentikan, dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks menegakkan keadilan, alat bukti petunjuk memainkan peran vital dalam memastikan akurasi bukti, menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum, mencegah kekeliruan atau ketidakadilan, serta menciptakan keadilan substansial dalam sistem peradilan yang adil.

**Kata Kunci:** alat bukti, petunjuk, hukum, pidana

#### **Abstract**

*This research aims to investigate the position of indicative evidence in the realm of criminal procedural law with a focus on its role in upholding justice. The research method uses journal analysis techniques to understand the points of view of various authors and legislative analysis to study related legal provisions. The research results highlight the central role of indicative evidence in identifying criminal acts, directing*

*investigations, and strengthening court decisions. Sources such as witness statements, letters and defendant statements are crucial elements in the court process, but their use must pay attention to credibility, authenticity and protection of human rights. In the context of upholding justice, indicative evidence plays a vital role in ensuring the accuracy of evidence, upholding the principle of equality before the law, preventing errors or injustice, and creating substantial justice in a fair justice system.*

**Keywords:** *evidence, instructions, law, crime*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam ranah hukum acara pidana, alat bukti memegang peranan utama sebagai pilar penegakan hukum yang kokoh. Mereka tidak hanya menjadi fondasi dari penyelidikan kasus, tetapi juga menjadi pondasi bagi proses penuntutan di pengadilan. Kehadiran alat bukti mengilhami keyakinan bahwa kebenaran dapat diungkap melalui fakta, dokumentasi, kesaksian, atau informasi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, integritas dan keabsahan alat bukti menjadi landasan bagi keberhasilan atau kegagalan suatu kasus dalam sistem hukum pidana.<sup>1</sup>

Alat bukti menjadi instrumen yang vital dalam proses peradilan. Di pengadilan, kehadiran bukti yang kuat dan sah adalah penentu utama dalam meyakinkan hakim untuk memutuskan suatu kasus. Kemampuan alat bukti dalam memberikan gambaran yang jelas dan faktual tentang kejadian yang terjadi merupakan kunci bagi keberhasilan pihak yang menuntut atau mempertahankan diri. Oleh karena itu, pengumpulan, penyajian, dan interpretasi alat bukti menjadi aspek penting yang harus dijaga dengan cermat selama proses peradilan.<sup>2</sup>

Pentingnya alat bukti juga terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum yang adil, keberadaan alat bukti yang sah adalah jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran atau membela diri.<sup>3</sup> Kesalahan atau manipulasi

---

<sup>1</sup> Subekti, R. (2010). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.

<sup>2</sup> Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Tresna, M. R. (2005). *Komentar atas HIR*. PT. Pradnya Paramita.

terhadap alat bukti dapat mengakibatkan ketidakadilan yang serius, yang berpotensi merampas hak-hak individu yang seharusnya dilindungi dalam proses peradilan.

Kedudukan alat bukti juga menegaskan kewenangan hukum dalam menilai kebenaran suatu kasus. Hakim, jaksa, dan pihak-pihak terlibat dalam proses hukum mengandalkan alat bukti sebagai dasar pertimbangan yang obyektif. Ketergantungan pada alat bukti menjadikan sistem hukum lebih terstruktur dan terukur dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya.

Dalam era perkembangan teknologi, peran alat bukti mengalami transformasi. Rekaman video, data digital, dan teknologi forensik baru menjadi bagian integral dari alat bukti yang diterima. Ini mendorong perlunya penyesuaian hukum acara pidana terhadap perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam menegakkan keadilan.

## **2. Penelitian terdahulu**

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Prameswari et al (2015). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali kedudukan alat bukti petunjuk dalam ranah hukum acara pidana, khususnya karena seringkali menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Tujuan tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa penggunaan alat bukti petunjuk yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan putusan yang tidak pasti atau mengambang, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau samar.<sup>4</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yang mencakup analisis terhadap bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Bahan ini terdiri dari bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (misalnya, literatur, putusan pengadilan terkait, dan teori hukum). Dari analisis tersebut, penulis menarik kesimpulan terkait kedudukan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.

---

<sup>4</sup> Prameswari, N., Samirah, & Yuliati, S. W. (2015). Kedudukan alat bukti petunjuk di ranah hukum acara pidana. *Jurnal Verstek*, 3(2).

Hasil penelitian menegaskan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, berdasarkan kesesuaian dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa alat bukti petunjuk menjadi penting apabila alat bukti lainnya belum mencapai batas minimum pembuktian yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHP.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil memberikan gambaran tentang pentingnya alat bukti petunjuk dalam konteks hukum acara pidana, mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memperolehnya, serta menyoroti situasi di mana alat bukti petunjuk menjadi esensial dalam memastikan tercapainya kebenaran dalam suatu perkara hukum.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah penelitian yang relevan. Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah:

- 1) Bagaimana peran dan kekuatan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana?
- 2) Apa saja sumber-sumber dan prosedur penggunaan alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa?
- 3) Bagaimana alat bukti petunjuk untuk menegakkan keadilan dalam suatu perkara hukum?

### **4. Metode Penelitian**

Dalam rangka menjalankan penelitian ini, penulis memilih dua metode penelitian yang memungkinkan pemahaman yang komprehensif terkait kedudukan alat bukti petunjuk di ranah hukum acara pidana.<sup>5</sup>

#### **1. Teknik Analisis Jurnal:**

---

<sup>5</sup> Bezryadin, V. (2022). The origins of the institute of physical evidence in Russian criminal proceedings (As origins do instituto de provas físicas em processos criminais russos). *Lex Humana, Petrópolis*, 14(1), 430-442.

Metode ini digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis isi jurnal secara sistematis. Tujuannya adalah memahami serta mengevaluasi informasi yang terdapat dalam jurnal. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap sudut pandang yang berbeda-beda dari para penulis, mendeteksi tren atau pola yang muncul dari hasil penelitian sebelumnya, serta mengevaluasi kehandalan dan relevansi informasi yang ditemukan.

## 2. Analisis Perundang-Undangan:

Metode ini fokus pada mempelajari ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan alat bukti petunjuk di ranah hukum acara pidana. Penelitian dilakukan dengan mendalami pasal-pasal, aturan, dan regulasi yang terkait dengan penggunaan alat bukti petunjuk dalam sistem hukum pidana. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi validitas dan relevansi hukum yang ada terhadap masalah yang diteliti, serta memahami bagaimana hukum secara konseptual mengatur dan mengenali kedudukan alat bukti petunjuk.

Dengan menggunakan metode analisis jurnal dan analisis perundang-undangan, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang bagaimana alat bukti petunjuk diatur dan digunakan dalam ranah hukum acara pidana, serta memperoleh wawasan dari sudut pandang akademis dan hukum yang berbeda.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Dan Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana**

Alat bukti petunjuk memainkan peran sentral dalam hukum acara pidana. Mereka menjadi faktor penting dalam proses pengumpulan bukti, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Peran utamanya adalah sebagai indikator atau petunjuk terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>6</sup>

#### 1. Identifikasi Terjadinya Tindak Pidana

---

<sup>6</sup> Bezryadin, V. (2022). The origins of the institute of physical evidence in Russian criminal proceedings (As origins do instituto de provas físicas em processos criminais russos). *Lex Humana, Petrópolis*, 14(1), 430-442.

Alat bukti petunjuk memungkinkan pengungkapan terjadinya suatu tindak pidana. Mereka menjadi titik awal bagi penyelidikan dalam mengarahkan penyidik atau penegak hukum untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang dapat mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan suatu kejahatan.

#### 2. Penunjuk Identitas Pelaku

Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi siapa pelaku tindak pidana tersebut. Alat bukti petunjuk, seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, memberikan petunjuk atau gambaran tentang pelaku kejahatan yang bisa digunakan untuk memperkuat kasus.

#### 3. Kekuatan dalam Proses Peradilan

Kekuatan alat bukti petunjuk sangat penting dalam pengadilan. Mereka menjadi elemen kunci yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan kesalahan atau kebenaran suatu kasus. Bukti yang kuat dan sah akan menguatkan putusan pengadilan untuk memastikan keadilan.

#### 4. Penggalan Informasi Tambahan

Selain itu, alat bukti petunjuk sering menjadi pintu masuk untuk menggali informasi tambahan. Mereka bisa menjadi landasan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, memvalidasi bukti lain, atau mengarahkan penyelidikan pada arah yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya.

#### 5. Keterbatasan dan Perlindungan Hak Asasi

Namun, perlu diingat bahwa meskipun penting, alat bukti petunjuk juga memiliki keterbatasan. Penggunaannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan dan pembuktian yang adil.

## **2. Sumber-Sumber Dan Prosedur Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Seperti Keterangan Saksi, Surat, Dan Keterangan Terdakwa**

Sumber-sumber dan prosedur penggunaan alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa menjadi elemen krusial dalam proses hukum acara pidana.<sup>7</sup>

1. Keterangan Saksi:

Saksi merupakan salah satu sumber utama alat bukti petunjuk. Prosedur penggunaannya melibatkan pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan oleh individu yang hadir atau mengetahui peristiwa terkait tindak pidana. Penting untuk mencatat bahwa kredibilitas dan keandalan saksi menjadi pertimbangan kunci dalam penerimaan bukti ini.

2. Surat dan Dokumen:

Surat atau dokumen juga menjadi sumber yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Proses penggunaannya melibatkan analisis terhadap isi dokumen yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Penting untuk memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.

3. Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa juga memiliki peran penting sebagai sumber alat bukti petunjuk. Prosedur penggunaannya melibatkan pengungkapan fakta atau informasi dari pihak yang didakwa terkait peristiwa yang sedang disidangkan. Penekanan pada kejujuran dan ketepatan keterangan terdakwa menjadi faktor penentu dalam penerimaan keterangan ini.

a. Prosedur Penggunaan yang Sah:

Penggunaan sumber-sumber alat bukti petunjuk ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengumpulan, presentasi, dan penggunaannya harus mematuhi standar hukum acara pidana yang mengatur keabsahan, keotentikan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap pengadilan.

b. Perlunya Kredibilitas dan Korelasi dengan Fakta:

---

<sup>7</sup> Grigoryan, T., Gorlova, Y., & Chasovnikova, O. G. (2023). Ius constituendum of electronic evidence arrangement in criminal procedure law. *Jurnal Legalitas*, 16(2).

Keandalan, kredibilitas, dan relevansi dari sumber-sumber alat bukti petunjuk ini menjadi poin penting. Penggunaannya harus dapat memperkuat atau menguatkan keterkaitan dengan fakta-fakta yang ada guna memastikan integritas dan kebenaran dalam proses peradilan.

### **3. Alat Bukti Petunjuk Untuk Menegakkan Keadilan Dalam Suatu Perkara Hukum**

Alat bukti petunjuk memegang peran vital dalam menegakkan keadilan dalam suatu perkara hukum. Perannya sebagai penunjuk terhadap kebenaran suatu tindak pidana dan siapa pelakunya menjadi kunci dalam memastikan bahwa keadilan terwujud.

#### **1. Memastikan Akurasi dan Kekuatan Bukti**

Alat bukti petunjuk membantu memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap dengan akurat. Mereka memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Ketika bukti yang kuat didukung oleh alat bukti petunjuk yang jelas dan konsisten, keputusan pengadilan menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

#### **2. Menegakkan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum**

Penggunaan alat bukti petunjuk yang tepat juga mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum. Mereka memastikan bahwa baik terdakwa maupun pihak yang menuntut memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan atau membela diri. Ini menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan.

#### **3. Mencegah Terjadinya Kekeliruan atau Ketidakadilan**

Alat bukti petunjuk juga berperan dalam mencegah terjadinya kesalahan atau ketidakadilan dalam putusan hukum. Dengan menawarkan informasi yang dapat diverifikasi dan diperhitungkan secara objektif, mereka mengurangi risiko kesalahan yang bisa terjadi dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

#### **4. Perlindungan Hak Asasi Individu**

---

<sup>8</sup> Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Mandar Maju.

<sup>9</sup> Soedirjo. (1985). *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*. CV. Akademika Pressindo.



Penggunaan alat bukti petunjuk yang sesuai dengan prosedur hukum juga merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi individu. Memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan bukti dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu seperti hak untuk memberikan keterangan atau hak atas privasi.

#### 5. Menciptakan Keadilan Substansial

Keadilan substansial dalam suatu perkara hukum tidak hanya mencakup proses yang adil, tetapi juga hasil yang adil. Alat bukti petunjuk membantu menciptakan keadilan substansial dengan memastikan bahwa kebenaran ditemukan dan diungkapkan secara transparan dalam pengadilan.

Keseluruhan, peran alat bukti petunjuk bukan hanya terbatas pada pengumpulan informasi, tetapi juga berkontribusi besar dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil.

### **C. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting. Mereka menjadi landasan utama dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta membantu dalam pengungkapan kebenaran suatu kasus. Peran mereka dalam menegakkan keadilan melibatkan identifikasi tindak pidana, pelaku kejahatan, dan memastikan integritas pengadilan dengan bukti yang kuat dan sah. Namun, penggunaan alat bukti petunjuk haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan harus memperhatikan perlindungan hak asasi individu. Dengan demikian, alat bukti petunjuk tidak hanya menjadi elemen penting dalam peradilan, tetapi juga merupakan penopang prinsip keadilan yang substansial dalam sistem hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bezryadin, V. (2022). The origins of the institute of physical evidence in Russian criminal proceedings (As origins do instituto de provas físicas em processos criminais russos). *Lex Humana, Petrópolis*, 14(1), 430-442.

Grigoryan, T., Gorlova, Y., & Chasovnikova, O. G. (2023). Ius constituendum of electronic evidence arrangement in criminal procedure law. *Jurnal Legalitas*, 16(2).

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Prameswari, N., Samirah, & Yuliati, S. W. (2015). Kedudukan alat bukti petunjuk di ranah hukum acara pidana. *Jurnal Verstek*, 3(2).

Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Mandar Maju.

Soedirjo. (1985). *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*. CV. Akademika Pressindo.

Subekti, R. (2010). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.

Tresna, M. R. (2005). *Komentaris atas HIR*. PT. Pradnya Paramita.